

**PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK
HORMAT NOTARIS MELALUI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
235/G/2019/PTUN.KT)**

TESIS

***Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan***



Oleh:

TYRESKAAULIA

2220122060

Pembimbing:

Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK
HORMAT NOTARIS MELALUI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
235/G/2019/PTUN.KT)**

Tyreska Aulia, 2220122060, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 2025

ABSTRAK

Perlindungan Hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUDN, juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris. Tetapi apabila Notaris mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan, seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengaturan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat menurut hukum positif di Indonesia? 2). Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembatalan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris (studi kasus putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor: 235/G/2019/PTUN.KT). 3). Bagaimana akibat hukum pembatalan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris (studi kasus putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor: 235/G/2019/PTUN.KT). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat tanpa dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris merasa dirugikan dan melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. 2). Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris karena majelis hakim menyimpulkan Majelis Pengawas Notaris melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 3). Putusan PTUN yang sudah membatalkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris tidak secara mutatis dan mutandis mengembalikan jabatan Notaris untuk menjadi aktif kembali, hal ini dibuktikan dengan izin Sistem Administrasi Badan Hukum milik Notaris yang sampai saat ini masih belum dibuka sejak tahun 2019 silam sampai penelitian ini selesai dan belum ada jaminan perlindungan hukum terhadap proses pengangkatan kembali Notaris tersebut. Hal ini justru sangat merugikan Notaris karena tidak aktif lagi menjadi seorang Notaris dan tidak dapat untuk membuat akta otentik sebagaimana kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUDN.

Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

***VOIDING THE DECISION LETTER OF TERMINATION WITHOUT RESPECT
TO THE NOTARY THROUGH THE DECISION OF THE STATE Administrative
Court (Case Study of the Decision of the Jakarta State Administrative Court
Number: 235/G/2019/PTUN.KT)***

Tyreska Aulia, 2220122060, Master of Kenotariatan Study Program, Faculty of Law,
Universitas Andalas, 2024

ABSTRACT

Legal protection is the right of every citizen not to get arbitrary treatment by law. Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Article 15 of UUN, is also a citizen who gets legal protection. Violation of the implementation of the Notary position is an action that is prohibited by the Notary. However, if a Notary receives a report of an alleged violation of the exercise of office, it should be examined and tried in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations. The problems in this research are 1). How is the regulation of dishonorable dismissal of Notary according to positive law in Indonesia? 2). How is the judge's consideration regarding the cancellation of the decision letter of dishonorable dismissal of a Notary (case study of the Jakarta State Administrative Court decision number: 235/G/2019/PTUN.KT). 3). What are the legal consequences of canceling the decision letter to dishonorably dismiss a Notary (case study of the Jakarta State Administrative Court decision number: 235/G/2019/PTUN.KT). The research method used is normative juridical. The results showed that 1). Notaries who are dishonorably dismissed without a tiered examination by the Notary Supervisory Council feel aggrieved and take legal action through the State Administrative Court. 2). The basis of the judge's consideration in canceling the decree of dishonorable dismissal of Notary because the panel of judges concluded that the Notary Supervisory Council violated the General Principles of Good Government. 3). The PTUN verdict that has canceled the Notary's Dismissal Decree does not mutatis mutandis restore the position of Notary to become active again, this is evidenced by the Notary's Legal Entity Administration System license which has not been opened since 2019 until this research is completed and there is no guarantee of legal protection for the Notary's reappointment process. This is actually very detrimental to the Notary because he is no longer active as a Notary and cannot make authentic deeds as the authority of the Notary regulated in Article 15 of the UUN.

Keywords: Notary, Notary Supervisory Council, Dishonorable Dismissal